



Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi UMKM Kerajinan Aceh

Rina Maulina¹, Ika Rahmadani², Sari Maulida Vonna³, Linda Rahmazaniati⁴, Lilis Marlina⁵
^{1,2,3,4,5} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia.

¹ rinamaulina@utu.ac.id

² ikarahmadani@utu.ac.id

³ sarimaulida.vonna@utu.ac.id

⁴ lindarahmazaniati@utu.ac.id

⁵ lilismarlina@utu.ac.id

Article Info

Received: 18 Mei 2023

Revised: 20 Mei 2023

Accepted: 29 Mei 2023

Abstrak: Kinerja nyata yang dihadapi oleh sebagian besar usaha terutama UMKM di Indonesia yang paling menonjol adalah rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya nilai tambah, dan rendahnya kualitas produk. Walau diakui pula bahwa UMKM menjadi lapangan kerja bagi sebagian besar pekerja di Indonesia, tetapi kontribusi dalam output nasional di katagorikan rendah. Hal ini dikarenakan UMKM, khususnya usaha mikro dan sektor pertanian (yang banyak menyerap tenaga kerja), mempunyai produktivitas yang sangat rendah. Bila upah dijadikan produktivitas, upah rata-rata di usaha mikro dan kecil umumnya berada dibawah upah minimum. Kondisi ini merefleksikan produktivitas sektor mikro dan kecil yang rendah bila di bandingkan dengan usaha yang lebih besar. Permasalahan UMKM khususnya di Aceh saat ini adalah sebagai berikut: Keterampilan SDM dan Manajemen masih rendah; Daya beli menurun dan daya saing rendah; Kualitas dan kapasitas produksi rendah dan tidak memiliki standarisasi; Tidak adanya inovasi produk; Tidak adanya sertifikasi (P-IRT, Halal, BPOM, SNI dll); Sulitnya akses pembiayaan; Kualitas rendah dan harga kemasan tinggi; Literasi digital rendah; Ekspor dan pemasaran nasional masih rendah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberi motivasi dan semangat kepada pelaku UMKM untuk melakukan wirausaha, meningkatkan kreativitas dan inovasi para pelaku UMKM, memberi pengetahuan, pemahaman, serta strategi pemasaran melalui *e-commerce*, memberi pelatihan manajemen keuangan pelaku UMKM. Sedangkan manfaat kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan motivasi dan produktivitas pelaku UMKM, membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya, membantu pelaku UMKM tertib mencatat setiap transaksi keuangan melalui sistem pembukuan sederhana sehingga dapat memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja UMKM.

Kata Kunci: UMKM, Manajemen Keuangan, Pelatihan keuangan UMKM

Abstract: *The real performance faced by most businesses, especially MSMEs in Indonesia, which is most prominent is the low level of productivity, low added value, and low product quality. Although it is also recognized that MSMEs provide employment for the majority of workers in Indonesia, their contribution to national output is categorized as low. This is because MSMEs, especially micro-enterprises and the agricultural sector (which absorb a lot of labor), have very low productivity. If wages are used as productivity, the average wage in micro and small enterprises is generally below the minimum wage. This condition reflects the low productivity of the micro and small sector when compared to larger businesses. The current problems of MSMEs, especially in Aceh, are as follows: HR and management skills are still low; Declining purchasing power and low competitiveness; Low quality and production capacity and lack of standardization; Absence of product innovation; There is no certification (P-IRT, Halal, BPOM, SNI etc.); Difficult access to financing; Low quality and high packaging price; Low digital literacy; Exports and national marketing are still low. This community service activity aims to provide motivation and enthusiasm for MSME actors to do entrepreneurship, increase the creativity and innovation of MSME actors, provide knowledge, understanding, and marketing strategies through e-commerce, provide financial management training for MSME actors. While the benefits of this community service activity are to increase the motivation and productivity of MSME actors, assist MSME actors in developing their business, help MSME actors orderly record every financial transaction through a simple bookkeeping system so that they can obtain information regarding the financial position and performance of MSME.*

Keywords: MSME, Financial Management, MSME financial training

*Corresponding Author:

Rina Maulina,

Jurusan Akuntansi, Fakultas
Ekonomi, Universitas Teuku
Umar, Meulaboh, Indonesia.;
Email: rinamaulina@utu.ac.id

PENDAHULUAN

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil Menengah yang di dalamnya terdapat pelaku bisnis yang bergerak diberbagai bidang usaha yang menyentuh kepentingan masyarakat. Di dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting. Karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern (Partomo & Soejoedono, 2014).

Melalui UMKM pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Ketika krisis moneter yang terjadi tahun 1998, hanya sektor UMKM masih dapat bertahan dalam *colapsnya* ekonomi. Mudradjad Kuncoro dalam Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2008 mengemukakan bahwa UMKM terbukti tahan terhadap krisis dan mampu survive karena pertama tidak memiliki utang luar negeri. Kedua, menggunakan input lokal. Ketiga, berorientasi ekspor. Selama 1997-2006, jumlah perusahaan berskala UMKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia. Sumbangan UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 96%. Sebanyak 91% UMKM melakukan kegiatan ekspor melalui pihak ketiga eksportir / pedagang perantara. Hanya 8,8% yang berhubungan langsung dengan pembeli / importer yang bertempat tinggal / berkewarganegaraan luar negeri.

Peran penting UMKM secara umum dapat kita lihat dari perkembangan yang signifikan serta perannya dalam menyumbangkan PDB terbesar di Indonesia. PDB (Produk Domestik Bruto) merupakan indikator pertumbuhan perekonomian. Pada tahun 2007 hingga 2012 menunjukkan peningkatan jumlah PDB UMKM dari Rp. 2.107.868.10 Milyar menjadi Rp. 4.869.568.10 Milyar atau rata-rata mengalami perkembangan sebesar 18,33% /tahun. Kemudian pada Usaha Besar (UB) sumbangsih terhadap perkembangan PDB lebih sedikit dibandingkan UMKM dengan persentase rata-rata perkembangan sebesar 15,75% /tahun. Dari data statistik yang diperoleh dari BPS, pada tahun 2012 UMKM menyerap 97,16% dari total tenaga kerja Industri di Indonesia atau sebesar 107.66 juta, sisanya atau sebesar 2,84% tenaga kerja diserap oleh sektor Usaha Besar (UB) (Hapsari dkk, 2014).

UMKM merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pengembangan industri manufaktur. Gerak sektor UMKM sangat vital untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. UMKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, juga mereka cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan (Mudrajad, 2013).

Saat ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Namun, peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia tidak didukung dengan penyaluran literasi keuangan kepada pelaku UMKM, khususnya dalam penyusunan dan menghasilkan laporan keuangan UMKM. Hal ini dianggap penting karena dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas pelaku UMKM menuju tingkat usaha yang lebih besar, untuk itu diperlukan pemberdayaan masyarakat oleh pihak-pihak relevan seperti Perguruan Tinggi (akademisi) agar pelaku UMKM memahami dan dapat melakukan manajemen keuangan usaha yang baik dan benar.

Kebijakan pemberdayaan UMKM secara umum diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja dan

peningkatan ekspor, serta revitalisasi pertanian dan perdesaan, yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Dalam kerangka itu, pengembangan UMKM diarahkan agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan peningkatan daya saing, sementara itu pengembangan usaha skala mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, khususnya di sektor pertanian dan perdesaan (KUKM, 2005).

Menurut Keppres RI No. 99 Tahun 1998, UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat pada skala kecil yang perlu dilindungi dan dicegah dari persaingan yang tidak sehat. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Berdasarkan Peraturan Undang- Undang No. 20 Tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut maka kriteria UMKM dibedakan meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Aceh, pada tahun 2019 persentase rasio kewirausahaan sebesar 3,3% atau setara 8,2juta, artinya dengan target 3,9% maka perlu 1,5 juta Penduduk yang usahanya menetap atau s.d tahun 2024 harus terdapat 9,7 juta jumlah penduduk yang usahanya menetap (catatan dengan jumlah penduduk 250jt). Sedangkan untuk persentase pertumbuhan penduduk, data BPS menyebutkan jumlah pelaku usaha non pertanian sebanyak 26,7 juta orang. Target pertumbuhan wirausaha s.d tahun 2024 adalah 4% atau kurang lebih 1 juta wirausaha baru. Target ini akan tercapai jika target Rasio Kewirausahaan Nasional 3,9% juga tercapai. Penumbuhan 1,5 juta wirausaha baru tentunya efektif dalam kurun waktu 3 tahun atau mulai tahun 2022 s.d 2024.

Meskipun jumlah pelaku UMKM cukup banyak dan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional, namun sebagian besar UMKM mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Secara umum, persoalan yang dihadapi oleh UMKM meliputi akses permodalan, pemasaran, manajemen usaha dan keuangan, aspek legal dan perpajakan. Pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan perusahaan khususnya UMKM. Hal ini disebabkan para pelakunya dihadapkan pada masalah SDM. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui akuntansi walaupun dalam hal ini standar yang digunakan bersifat dasar dan sederhana. Akuntansi merupakan proses sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi penggunanya.

Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa keberadaan bank sangat penting bagi rakyat banyak yang nantinya akan mendukung pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

Kredit perbankan memiliki segmen kredit mikro, kecil, dan menengah (MKM) yang menjadi mesin penting bagi pertumbuhan kredit perbankan (Mohamad, 2013). Dalam kegiatan menyalurkan dananya dalam bentuk kredit, terdapat beberapa usaha ekonomi yang menjadi sasaran pemberian kredit sebuah bank, seperti halnya usaha mikro kecil menengah (UMKM), investor, perusahaan pengembang, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan dana kredit.

Namun melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini yang lebih banyak ditopang oleh usaha-usaha kecil menengah, pihak bank akhirnya lebih memfokuskan pada pemberian

kredit kepada jenis usaha ini. Hal lain yang menjadikan alasan bank memberikan dana tersebut juga didasarkan pada keterbatasan dana yang dimiliki oleh jenis usaha ini. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan presiden tanggal 5 November 2007, presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari pemerintah melalui PT. Askrindo dan PT. Jamkrindo. KUR ini merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM dan koperasi terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam. Program KUR yang telah dipercayakan pemerintah kepada BRI yaitu memberikan bantuan dana dalam bentuk kredit guna meningkatkan perekonomian, pemberantasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja di nilai sangat bagus pertumbuhannya.

Persoalan modal masih menjadi suatu kendala bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkembang. Mereka tidak dapat memenuhi jumlah pesanan atau permintaan konsumen karena kekurangan biaya untuk produksi. "Suatu usaha tidak akan mencapai keberhasilan yang optimal apabila tidak didukung oleh struktur permodalan yang kuat" (Farid, 2017).

Menurut Farid (2017), untuk mengatasi masalah permodalan, pelaku usaha sebenarnya dapat memperoleh akses kredit ke perbankan. Namun, tak mudah dilakukan karena pelaku UMKM kadang kesulitan membuat pencatatan keuangan atau pembukuan yang baik, sehingga tidak mudah bagi perbankan untuk melakukan *assessment* risiko dan kelayakan pemberian kredit.

Selain itu, permasalahan lain yang terjadi di Aceh yaitu masyarakat Tanah Rencong enggan mengambil kredit dari perbankan konvensional. Mereka menganggap hal itu riba atau dosa sehingga tidak mau meminjam uang di bank. Hal ini sebenarnya menjadi peluang bagi perbankan syariah khususnya di Aceh untuk melakukan ekspansi usaha (Ahli perbankan, 2013). Berdasarkan data perbankan terkini yang ada di bank Indonesia, kata Farid (2017), pasca konversi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh menjadi Bank Aceh Syariah pada September 2016 silam, turut mendongkrak pangsa pasar perbankan syariah. Pangsa pasar perbankan syariah di Aceh yang semula 10,64 persen pada Maret 2016 menjadi 43,40 persen di Maret 2017. Kami harapkan perbankan syariah di Aceh dapat ikut serta mengembangkan UMKM.

Mengingat resiko yang dihadapi oleh bank cukup besar dalam pemberian kredit pada berbagai sektor ekonomi yang ada, maka sangat diharapkan pemberian masing-masing sektor ekonomi dapat optimal, dan pada akhirnya diharapkan memiliki resiko paling minimal. Bank dalam memberikan kreditnya terbagi dalam beberapa sektor ekonomi dan besarnya porsi pemberian kredit dapat terlihat dari posisi kredit masing-masing sektor ekonomi. Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank yang memiliki komitmen yang kuat terhadap pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Hal ini terlihat dari besarnya portofolio pinjaman UMKM di BRI yang mencapai 85.82% dari total portofolio kredit BRI (www.bri.co.id).

Sebagai lembaga yang memiliki komitmen tinggi terhadap penyaluran kredit ke UMKM, menurut penelitian dari Nandhifah (2008) BRI Unit harus mempunyai sistem tata kelola resiko yang baik untuk meminimalisir kerugian, sehingga BRI bisa terus menyalurkan kredit

ke UMKM. Identifikasi dan analisis resiko kredit sangat penting dan berguna sebagai salah satu input alternatif dalam perumusan strategi tata kelola resiko kredit.

Bank menyalurkan dana dengan memberikan pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Praktik pembiayaan yang dilakukan adalah dengan sistem bagi hasil atau *syirkah*. Syirkah ini dilakukan dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Jenis pembiayaan lainnya adalah termasuk dalam akad jual beli, yaitu murabahah, *bai' as-salam* dan *bai' al-istisna* (Muhammad, 2015).

Atas dasar pertimbangan ini, Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI) bermaksud memfasilitasi para dosen mendesiminasikan karya-karya ilmiahnya untuk membantu mengembangkan dan mencerdaskan masyarakat luas dalam wujud kegiatan pengabdian masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peran dosen Akuntansi dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat khususnya pelaku UMKM.

METODE KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan pada usaha kerajinan Aceh yang berada pada beberapa daerah di Provinsi Aceh yaitu; Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Tengah dan Kota Lhokseumawe. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pelatihan manajemen keuangan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha kerajinan Aceh,

Selanjutnya pelatihan akan diberikan oleh dosen ADAI pada daerah masing-masing. Kegiatan akan didokumentasikan melalui video yang selanjutnya akan ditampilkan secara serentak pada kegiatan utama. Kegiatan utama dilaksanakan pada tanggal 17 September 2022 di Aula Politeknik Aceh pukul 08.30 sd selesai. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid (*offline* dan *online*) agar dapat diikuti oleh peserta lainnya dari lain daerah (Nasional).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dimulai dengan melakukan survey oleh panitia kegiatan kepada pelaku-pelaku UMKM yang layak untuk diberikan pelatihan sesuai pemikiran dasar bahwa UMKM tersebut masih aktif, memiliki spesifikasi produk kerajinan Aceh, memiliki tempat usaha serta bersedia diberikan pelatihan. Ditetapkan dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh, sebanyak 5 Kabupaten/Kota yang dimenjadi daerah kegiatan ini yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Tengah dan Kota Lhokseumawe. Dari 5 daerah tersebut diambil 2 UMKM sebagai sampel kegiatan sehingga total pelaku UMKM kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah 10 UMKM.

Selanjutnya tim *coordinator* Dosen ADAI pada masing-masing daerah tersebut mendatangi pelaku UMKM untuk melakukan pelatihan dengan metode presentasi materi pelatihan terkait manajemen keuangan usaha. Setelah itu dilanjutkan dengan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM dikaitkan dengan kebutuhan pelatihan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ternyata masalah yang paling banyak memang masalah pada bidang keuangan, baik itu pada pengelolaannya yang masih tercampur akan pengelolaan keuangan keluarga serta keuangan usaha, kurangnya modal, sulitnya mendapatkan jejaring dengan pihak lembaga keuangan atau perbankan. Untuk bidang pemasaran masalah yang mereka hadapi adalah masalah dari

Nonis Kue Aceh



KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan pada 5 daerah Kabupaten/Kota di Aceh Bersama Dosen ADAI dan pelaku UMKM, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan SDM yaitu pelaku UMKM terkait literasi keuangan serta strategi pemasaran usahanya.
2. Perlu pembinaan maupun pelatihan lebih lanjut bagi pelaku UMKM sesuai dengan permasalahan teknis yang dihadapi pelaku UMKM.
3. Perlu adanya pelatihan terkait manajemen keuangan serta pemasaran produk kearah yang lebih luas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan terlaksananya kegiatan ini antara lain:

1. Pelaku Usaha UMKM di Provinsi Aceh
2. Dr. Arfan Ikhsan Lubis., SE., M.Si (Ketua Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia)
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar
4. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar

DAFTAR PUSTAKA

- Ahli perbankan, 2013. "Peran bank dalam mengembangkan UKM". <http://ahliperbankan.com/peran-bank-dalam-mengembangkan-ukm-usaha-kecil-menengah/>
- Badan Pusat Statistik tahun 2022, *tentang target pertumbuhan wirausaha*.
- Dermawan, Dodi. 2017. <http://www.kbn.co.id/berita/2017/10/UMKM-Kurang-Mendapat-Dukungan-Modal-dari-Bank>
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Aceh tahun 2019, *tentang rasio kewirausahaan*.
- Farid, Ahmad. 2017. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3502490/umkm-sulit-dapat-modal-usaha-ini-solusi-bi>
- Hapsari, Pradnya Paramita, dkk. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintah Kota Batu. *Jurnal Universitas Brawijaya, Vol 7, No. 2*: 89.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998, *tentang Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicapangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan*.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2005). Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Ekonomi. Rapat Kerja Nasional I GARANSI. Surabaya.
- Mudrajad, Kuncoro. 2013. *Ekonomika Industri Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Muhammad. 2015. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN: 303.
- Mohamad, Kartono. 2013. Peta Baru Perbankan Mikro: Bertempur di Zona Merah: 18
- Nandhifah, 2013. Analisis Manajemen Resiko Kredit Umum Pedesaan.
- Partomo, Tiktik Sartika dan, Abdurrahman Soejoedono. 2014. *Ekonomi Skala Kecil / Menengah & Koperasi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia: 22.
- Republik Indonesia. 2008. Kementerian Koperasi dan UKM, *Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 *tentang UMKM*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.